

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang semakin pesat dan perkembangan tersebut membawa pengaruh besar terhadap suatu badan atau perusahaan, baik yang swasta maupun pemerintah. Semakin berkembangnya era demokrasi dan birokrasi pada saat ini maka semakin banyak tuntutan publik agar tercipta adanya transparansi dan akuntabilitas, agar kepercayaan tetap solid maka perlu diciptakan suatu kondisi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kondisi ini disebut *Good Corporate Governance (GCG)* (Dewi Saptantinah, 2010:1).

Good Corporate Governance (CGC) adalah tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Sukrisno Agoes 2013:101). Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* ini dalam kenyataannya menemui banyak kendala, diantaranya adalah masalah penyimpangan yang terjadi, misalnya adanya penyelewangan-penyelewangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan(Dewi Saptantinah, 2010). Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian internal untuk meminimalisir peluang terjadinya penyelewangan.

Kontribusi audit adalah menyajikan akuntabilitas dan integritas laporan keuangan selama memberikan pendapat yang independen, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.(Trimantoo S. Wardoyo : 2010).

Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut (Trimanto S. Wardoyo : 2010). Salah satu inti dari audit internal adalah mengatur secara sistematis dan mengevaluasi pengendalian internal dalam perusahaan.

Pada era transparan dan terbuka saat ini, dalam menjalankan profesinya, auditor dituntut untuk lebih bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan mendasarkan pada kode etik dan standar profesi yang mengatur perilaku akuntan dan dapat bersikap independen dalam mendeteksi kemungkinan perilaku menyimpang atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini telah diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK-06/2002 yang mengatur mengenai rotasi wajib bagi auditor dan kantor akuntan publik tidak diperbolehkan memberikan jasa non audit di samping jasa audit itu sendiri karena dapat mengganggu independensi auditor.

Fungsi audit internal meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan efektifitas dikaitkan dengan rencana strategis perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Hal ini dibuktikan dengan keputusan menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 pasal 22 yang menyebutkan bahwa direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN. Sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien serta dipatuhinya aturan-aturan internal perusahaan dan aturan dari luar yang terkait dengan perusahaan sehingga dapat tercipta akuntabilitas.

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terlepas dari peran pengendalian internal yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Pengendalian internal yang efektif dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian besar dan sebaliknya tanpa pengendalian internal yang efektif maka kendala atau risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi oleh pemilik perusahaan. Struktur pengendalian internal mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai mengenai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima kategori tersebut merupakan komponen dari sistem pengendalian internal yaitu: lingkungan pengendalian, penetapan risiko

manajemen, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan (Morita Indah Lestari, 2013).

Menurut Wahyudin Zarkasyi (2008:1). Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Hal ini karena buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Sejak itulah, semua pihak memiliki tekad yang sama untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta. Berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (CGG) di semula lini.

Berdasarkan pengamatan, pada umumnya hambatan dan permasalahan *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN yaitu kecurangan (fraud) yang sering terjadi adalah: Penggelembungan nilai proyek atau biaya, pengeluaran fiktif, pemecahan nilai proyek untuk menghindari aturan tender, arisan tender dimana tender hanya formalitas saja sebelum tender sudah ada pemenangnya (titipan direksi).

Hal ini terlihat dari adanya kasus-kasus yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti terungkapnya PT Jasa Marga mengabaikan *Good Corporate Governance*. Investor mempertanyakan kualitas tata kelola perusahaan atau (*good corporate governance/GCG*) PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Sebab, perusahaan milik negara ini membiarkan salah seorang manajernya melakukan

gratifikasi berupa motor gede (moge) Harley-Davidson kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, mengatakan JSMR memang telah mengabaikan prinsip good corporate governance. Sebab, kalau benar-benar dijalankan, tidak perlu gratifikasi. "Kalau GCG dijalankan, pasti JSMR sehat secara manajemen. Artinya, manajemen tidak takut diaudit oleh pihak mana pun.

Namun, kalau kemudian melakukan gratifikasi, berarti ada yang tidak sehat, apalagi untuk memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Diperburuk lagi dengan mental korup oknum auditor BPK maka terjadilah gratifikasi," kata Wayan saat dihubungi, Minggu (24/9). Sesuai undang-undang, direktur utama selaku pimpinan perusahaan merupakan penanggung jawab tertinggi perusahaan.

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diduga melakukan penyimpangan keuangan negara. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumarjati Arjoso di Gedung DPR. Ia menyayangkan masih banyaknya BUMN yang belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Padahal, BUMN merupakan perusahaan negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Lebih jauh, BAKN menemukan penyimpangan sebanyak 28 kasus ketidakefektifan senilai RP 44,75 triliun di beberapa BUMN. Tingginya angka ketidakefektifan di BUMN mengindikasikan bahwa pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran. Menurut LHP I 2013 terhadap sebagian kecil BUMN menunjukkan betapa buruknya tata kelola BUMN.

Kasus yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia yaitu kasus pencurian dan penjualan dua gerbong kereta api (KA) kuno keluaran 1893 yang tersimpan di peti kemas, Depo, Stasiun Jebres, Solo tanpa sepengetahuan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Pencurian gerbong dilakukan secara bertahap dengan cara diangkut menggunakan truk tonton. Terdakwa Yoga Prasetyo, yang merupakan mantan Kepala Stasiun Depo Wilayah Solo ini melanggar hukum sesuai Pasal 362 juncto Pasal 372 KUHP tentang Pencurian disertai Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Kepala Humas PT KAI Daops VI Yogyakarta, Eko Budiyo menyatakan pihaknya mendukung proses hukum kasus pencurian gerbong kereta kuno oleh kepolisian. Namun dia mengingatkan semua pihak supaya tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Untuk pembenahan internal, menurutnya telah dilakukan guna mewujudkan *good corporate governance*, diantaranya setiap pegawai PT KAI harus bersikap jujur dan peduli terhadap aset-aset PT KAI.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang cukup penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Namun fakta yang ada, menunjukkan bahwa masih relatif banyak BUMN yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Menurut laporan BPKP, salah satu penyebab terpuruknya kondisi keuangan pada BUMN adalah masih lemahnya pengendalian internal. Lemahnya pengendalian internal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran auditor internal perusahaan dalam menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal. Penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No.

KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. BUMN menerapkan *Corporate Governance* untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Dalam undang-undang BUMN Nomor 19 tahun 2003 disebutkan bahwa untuk dapat mengoptimalkan peran BUMN dan agar mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN (Hery, 2010:11).

Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. yang dimaksud dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 adalah Transparansi (*transparancy*), Independen (*independency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), dan Kewajiban (*fairness*) yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperlihatkan pemangku kepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BUMN dan Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Dimas Sumadyo (2013) pada Perbankan yang terdaftar di BEI tentang Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi Auditor Internal dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Morita Indah Lestari (2013) pada Rumah Sakit Umum di kota Padang tentang Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada seluruh Rumah Sakit Umum di Kota Padang.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti melakukan penelitian pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Judul dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dari judul tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen, variabel independen yang pertama yaitu Independensi Auditor Internal dan variabel independen yang kedua yaitu Pengendalian Internal serta variabel dependennya yaitu Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Independensi Auditor Internal dan

Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*(survey pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Lemahnya pengendalian internal disebabkan oleh belum optimalnya peran auditor internal perusahaan BUMN dalam menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal.
2. Perusahaan BUMN harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan.
3. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam kenyataannya menemui banyak kendala diantaranya masalah penyimpangan yang terjadi seperti adanya penyelewengan-penyelewengan pencurian dan penjualan dua gerbong kereta api (KA) kuno keluaran 1893 yang tersimpan di peti kemas, Depo, Stasiun Jebres, Solo tanpa sepengetahuan manajemen PT Kereta Api Indonesia.

4. Pada tahun 2016 BAKN menemukan penyimpangan sebanyak 28 kasus ketidaefektifan senilai RP.44,75 triliun di beberapa BUMN. Tingginya angka ketidaefektifan di BUMN mengindikasikan bahwa pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Independensi Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara parsial dan simultan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara parsial dan simultan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara parsial dan simultan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana Independensi Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Menganalisis dan mengetahui bagaimana Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Menganalisis dan mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara parsial dan simultan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara parsial dan simultan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Idependensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara parsial dan simultan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh dari Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah referensi yang dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk memahami dan menambah pengetahuan bagi penulis mengenai Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

2. Bagi perusahaan yang bersangkutan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan evaluasi apakah Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan baik.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang beralamat di Jln. Perintis Kemerderkaan No.1. Adapun waktu penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada bulan April sampai dengan selesai.